

Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi

Ziyadaturrofiqoh; Zulfanetti; Muhammad Safri

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email korespondensi: zhiyadr@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of GRDP, Provincial Minimum Wage, government expenditure on employment in Jambi Province during the period of 1997-2015. The type of data used in this study is secondary data. The results of this study found that simultaneously GRDP, provincial minimum wage, government expenditure has a significant effect on the employment in Jambi Province. The coefficient of determination (R^2) shows that the independent variables studied are able to explain 91 percent of the employment and the remaining 9 percent are explained by other variables that are not examined. Partially PDRB significantly influence the employment in Jambi Province. While the Provincial Minimum Wage and Government expenditure did not affect the employment in Jambi Province.

Keywords: *Employment, GRDP, Wage, Government Expenditure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi (UMP), pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi selama kurun waktu 1997-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMP, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi periode 1997 – 2015. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti mampu menjelaskan 91 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sisanya 9 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, sedangkan UMP dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, Upah, Pengeluaran pemerintah

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten atau kota serta daerah - daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu "suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2003). Tujuan inti dari proses pembangunan adalah meningkatnya

ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Menurut Kuncoro (2003), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja disetiap tahunnya. Khususnya di Provinsi Jambi, merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, dengan menduduki peringkat ke-4 di Sumatera yakni 3.168.637 jiwa.

Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selama periode Tahun 2010 sampai 2016, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,07 persen pertahun. Pertumbuhan tenaga kerja ini jika tidak diimbangi oleh adanya lapangan pekerjaan akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah guna mengatasi hal tersebut.

Secara makro, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji tiga faktor diantaranya yaitu PDRB, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah.

Proses pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi diawali dari peningkatan produksi penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat sebagai akibat peningkatan tenaga kerja. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono (1998) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja). Karena sesuai teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan input merupakan *derived demand* dari permintaan output, yang artinya permintaan akan input baru terjadi bila ada permintaan akan output. Akan tetapi jika perusahaan menggunakan padat modal maka permintaan tenaga kerja menurun, karena perusahaan atau industri telah menggunakan teknologi untuk memproduksi hasil outputnya.

Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi (Sumarsono, 2003). Apabila harga produk naik, konsumen akan mengurangi konsumsi atau membuat permintaan terhadap produk tersebut berkurang. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya, dengan asumsi perusahaan menggunakan teknologi padat karya (labor intensive). Turunnya target produksi perusahaan, memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Ketika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja tersebut oleh pengusaha akan cenderung turun yang berarti kesempatan kerja juga mengalami penurunan. Sebaliknya jika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja oleh pengusaha dan kesempatan kerja akan meningkat (Mankiw, 2006).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sadono Sukirno, 2000). Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja sehingga dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Steven A.Y. Lin (1994) juga mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya juga telah mendukung pengaruh PDRB, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.. Utami (2009) menemukan PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Arianto (2010) menemukan pengeluaran pemerintah dan ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh dalam jangka panjang. Nilasari (2007) menemukan pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional memberikan pengaruh positif terhadap kesempatan kerja, sedangkan investasi memberikan pengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di Jawa Barat. Dimas dan Neni Novianti (2009) menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Setianingrum (2008) menemukan investasi dan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis perkembangan PDRB, UMP, Pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi; 2) menganalisis pengaruh PDRB, UMP dan Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data runtutan waktu (*time series*). Selama kurun waktu 1997-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lembaga – lembaga resmi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tulisan – tulisan yang dianggap relevan dari beberapa media massa yang mendukung dalam penulisan ini.

Analisis deskriptif digunakan untuk tujuan pertama yaitu menganalisis perkembangan PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi. Alat analisis regresi berganda yang digunakan untuk tujuan kedua yaitu menganalisis pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Model regresi yang digunakan adalah model regresi double log sebagai berikut :

$$\text{Log}Y = \alpha + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + \mu$$

Dimana :

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Intersep

Y = Penyerapan Tenaga Kerja

X1 = Produk domestik regional bruto di Provinsi Jambi

X2 = Upah Minimum di Provinsi Jambi

X3 = Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jambi

μ = Faktor Pengganggu

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan didalam model Gujarati (1999). Bila F-hitung lebih besar dari F-tabel berarti H_0 ditolak, artinya variabel X secara simultan mampu menjelaskan Variabel Y. Tingkat signifikan yang digunakan adalah α (5% atau 0,05).

Uji t ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah α (5% atau 0,05)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB Provinsi Jambi

Dalam kurun waktu tahun 1997 hingga 2015 perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan dengan rata – rata perkembangan sebesar 5,49 persen. Peningkatan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 18 miliar rupiah dengan peningkatan sebesar 8,54 persen dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena telah memadainya infrastruktur yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang membuat jalannya perekonomian di Provinsi Jambi membaik dari perbaikan jalan maupun informasi . Hal ini membuat lancarnya kegiatan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang terjadi. Kemudian pada tahun 2013 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif . Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 20,73 persen .Sektor lainnya

masing masing tumbuh sebagai berikut : sektor perdagangan ,Hotel dan Restoran 12,24 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 8,25 persen ; sektor keuangan , persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 7,88 persen ; sektor Pertanian, Peternakan , Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 7,42 persen ; Industri Pengolahan sebesar 5,69 persen ; sektor Jasa- jasa tumbuh sebesar 4,80 persen ; serta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 1,56 persen.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jambi Tahun 1997 - 2015

Tahun	PDRB (juta rupiah)	Perkembangan (%)
1997	9.283712	-
1998	9.280.120	-0.04
1999	9.290.739	0,11
2000	9.569.242	3,00
2001	10.205.592	6.65
2002	10.803.423	5.86
2003	11.343.279	5.00
2004	11.953.885	5.38
2005	12.619.972	5.57
2006	13.363.621	5.89
2007	14.275.161	6.82
2008	15.297.770	7.16
2009	16.274.907	6.39
2010	17.465.253	7.31
2011	18.963.518	8.58
2012	20.373.533	7.44
2013	21.979.277	7.88
2014	23.309.000	6.05
2015	24.202.161	3.83
	Rata – rata	5.49

Sumber: Jambi Dalam Angka Tahun 1997-2015 (data diolah)

Perkembangan Upah minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jambi

Perkembangan tingkat UMP di Provinsi Jambi selama tahun 1997-2015 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 16,17 persen pertahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 41,62 persen , hal ini dikarenakan pada tahun awal tahun 2000 hingga 2001 Indonesia mulai bangkit dari krisis moneter yang melanda termasuk juga di Provinsi Jambi. Kemudian pada tahun 2002 upah juga meningkat menjadi Rp.304.000 atau naik sebesar 24,08 persen. Hal ini dikarenakan sektor – sektor di PDRB Provinsi Jambi mulai berkembang, dan tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar 28,29 persen sehingga pada saat itu tercatat upah di Provinsi Jambi sebesar Rp. 390.000.

Secara terperinci perkembangan UMP di Provinsi Jambi diberikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 1997 – 2015

TAHUN	UPAH (rupiah)	PERKEMBANGAN
1997	119.500	-
1998	137.500	15,06
1999	150.000	9,09
2000	173.000	15,33
2001	245.000	41,62
2002	304.000	24,08
2003	390.000	28,29
2004	425.000	8,97
2005	485.000	14,12
2006	563.000	16,08
2007	658.000	16,87
2008	724.000	10,03
2009	800.000	10,50
2010	900.000	12,50
2011	1.028.000	14,22
2012	1.142.500	11,14
2013	1.300.000	13,79
2014	1.502.300	15,56
2015	1.710.000	13,83
Rata – rata		16,17

Sumber: BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 1997-2015

Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi

Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Jambi selama Tahun 1997-2015 diberikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 1997-2015

Tahun	Belanja Langsung (juta rupiah)	Perkembangan (%)	Belanja Tidak Langsung (juta rupiah)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah (juta rupiah)	Perkembangan (%)
1997	70.076	-	47.041	-	117.117	-
1998	74.665	6.55	47.731	1.47	122.396	4.51
1999	92.030	23.26	62.627	31.21	162.483	32.75
2000	91.494	-0.58	69.151	10.42	181.786	11.88
2001	173.405	89.53	93.452	35.14	266.857	46.80
2002	235.687	35.92	128.405	37.40	364.092	36.44
2003	366.228	55.39	185.624	44.56	451.852	24.10
2004	329.934	-9.91	251.499	35.49	588.588	30.26
2005	416.359	26.19	226.474	-9.95	641.012	8.91
2006	685.391	64.62	277.848	22.68	963.239	50.27
2007	779.354	13.71	327.338	17.81	1.106.692	14.89
2008	805.455	3.35	511.724	56.33	1.317.179	19.02
2009	844.897	4.90	685.176	33.90	1.530.073	16.16
2010	815.863	-3.44	627.067	-8.48	1.442.930	-5.70
2011	989.902	21.33	760.339	21.25	1.750.241	21.30
2012	1.363.636	37.75	1.194.444	57.09	2.558.080	46.16
2013	1.740.363	27.63	1.271.932	6.49	3.012.295	17.76
2014	1.721.517	-1.08	1.483.116	16.60	3.204.633	6.39
2015	1.663.175	-3.39	1.762.391	18.83	3.425.566	6.89
Rata rata		21.76			23.79	21.60

Sumber : BPS, Indikator Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 1997-2015 (data diolah)

Realisasi perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jambi tahun 1997-2015 di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dengan rata – rata perkembangan sebesar 21,60 persen. Laju perkembangan pengeluaran Pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 50,27 persen hal ini terjadi disebabkan karena adanya peningkatan pada belanja tidak langsung sebesar 22,68 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya dan peningkatan belanja langsung sebesar 64,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2001 juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi yaitu sebesar 46,80 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mengalami perkembangan 11, 80 persen. Peningkatan ini terjadi disebabkan karna meningkatnya realisasi belanja langsung sebesar 89,53 persen dan peningkatan pada realisasi belanja tidak langsung 35,14 persen. Sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 1998 sebesar 4,51 persen, ini terjadi disebabkan karna pada tahun 1998 mengalami dampak dari krisis moneter di tahun sebelumnya . Pada tahun 2010 terjadi penurunan pengeluaran pemerintah daerah yaitu sebesar 5,70 persen , akan tetapi pada tahun 2012 realisasi pengeluaran Pemerintah kembali meningkat yaitu sebesar 46,16 persen hal ini terjadi karna meningkatnya belanja langsung sebesar 37,75 persen

Perkembangan Penyerapan tenaga kerjadi Provinsi Jambi

Perkembangan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi selama tahun 1997-2015 yang cenderung berfluktuatif di setiap tahunnya .Selama periode 1997-2015 mampu menyerap tenaga kerja rata – rata sebesar 2,57 persen pertahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,79 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2011 terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian, sektor industri, dan perdagangan. Pada tahun 2009 juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,60 persen.Hal ini terjadi karena peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian, industri ,bangunan ,perdagangan dan jasa kemasyarakatan.Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,92 persen, disebabkan peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian yang relatif kecil sebesar 0,16 persen dan terjadi penurunan di sektor industri dan bangunan.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di sektor ekonomi di Provinsi Jambi tahun 1997 – 2015

Tahun	Tenaga Kerja	Perkembangan (%)
1997	998.286	-
1998	1.081.960	8.38
1999	1.103.640	2.00
2000	1.117.562	1.26
2001	1.112.262	-0.47
2002	1.107.883	-0.39
2003	1.103.076	-0.43
2004	1.137.460	3.12
2005	1.097.207	-3.54
2006	1.097.697	0.04
2007	1.171.868	6.76
2008	1.182.673	0.92
2009	1.272.520	7.60
2010	1.290.706	1.43
2011	1.468.658	13.79
2012	1.423.624	-3.07
2013	1.382.471	-2.89
2014	1.491.038	7.85
2015	1.550.403	3.98
Rata - rata		2,57

BPS, Jambi Dalam Angka Tahun 1997-2015(data diolah)

Pengaruh PDRB, UMP dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi

Uji asumsi klasik

Uji autokorelasi. Berdasarkan uji autokorelasi metode *Breusch-Godfrey* dengan menggunakan *eviews 9.0*, dapat diketahui bahwa nilai prob. chi square sebesar 0,6466 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa didalam model penelitian tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan demikian H_0 diterima.

Uji multikolinearitas. Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi antar variable independen seluruhnya $< 0,10$ yang berarti bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar olahan data menunjukkan hasil bahwa tidak ada adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat, maka dapat dikatakan dalam model tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa nilai Probabilitas dari *Jarque Berra* sebesar $0.872026 > = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa data persamaan PDRB, UMP dan Pengeluaran pemerintah, penyerapan tenaga kerja berdistribusi normal sehingga analisis akan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan secara statistic akan menghasilkan kesimpulan yang akurat karena telah memenuhi prasyarat asumsi klasik.

Tabel 5. Hasil regresi linier berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.767214	0.749278	2.358555	0.0323
LOG_PDRB	0.690061	0.140838	4.899672	0.0002
LOG_UPAH	-0.044672	0.070184	-0.636502	0.5340
LOG_PP	-0.061615	0.051885	-1.187531	0.2535
R-squared	0.910043	Mean dependent var		6.082985
Adjusted R-squared	0.892052	S.D. dependent var		0.056592
S.E. of regression	0.018593	Akaike info criterion		-4.947351
Sum squared resid	0.005186	Schwarz criterion		-4.748522
Log likelihood	50.99984	Hannan-Quinn criter.		-4.913702
F-statistic	50.58208	Durbin-Watson stat		1.501974
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah, 2017

Uji Hipotesis

Uji F. Berdasarkan nilai probabilitas F-stat sama dengan 0,0000 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05, nilai Prob F statistik $< = 5\%$ sehingga keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 artinya Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Uji t. Nilai Prob dari PDRB sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan Prob dari UMP sebesar 0,5340 lebih besar dari 0,05. Ini berarti UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan untuk pengeluaran pemerintah menunjukkan nilai Prob sebesar 0.2535 lebih besar dari 0,05. ini juga berarti pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata perkembangan PDRB selama periode 1997-2015 berdasarkan harga konstan sebesar 5,49 persen. Perkembangan UMP di Provinsi Jambi selama periode 1997-2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 16,17 persen pertahunnya. Perkembangan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi selama periode 1997-2015 menunjukkan nilai fluktuatif. Rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah adalah mencapai 21,6 persen.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Sedangkan variabel UMP dan Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu untuk perlu mengatasi masalah pengupahan dan juga hendaknya menyusun kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dari penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam memprioritaskan pembangunan daerahnya, terutama untuk dapat memberikan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan serta pengembangan SDM yang lebih merata. Agar dapat lebih memperluas lapangan kerja Pemerintah Daerah harus lebih tajam dalam pengalokasian pengeluarannya untuk sektor – sektor ekonomi yang masih potensial, dan pengeluaran pemerintah hendaknya lebih dioptimalkan untuk biaya pembangunan serta menciptakan produktifitas yang dapat menyerap tenaga kerja.

Daftar pustaka

- Amir. (2007). *Dasar - dasar Penulisan Karya Ilmiah*. UNS Press: Surakarta
- Andrew E. Sikula.(1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga: Bandung.
- Arsyad, Lincoln.(2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIM YKPN: Yogyakarta.
- Bellante, Don dan Mark Jackson. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Boediono.(1998). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPF: Yogyakarta
- Budi, Utami, Turminijanti.(2009). *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember*. Tesis. Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember.
- BPS .(1997). *Jambi Dalam Angka..BPS : Jambi*.
- Dimas, Nenek Woyanti. (2009). *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 31-41*
- Dumairy (1997). *Ekonomi Indonesia*, Erlangga: Jakarta.
- Gujarati, Damodar. (1999). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga: Jakarta
- Hardiani, H; Junaidi, J. (2011). Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai

- Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. Laporan Penelitian. Kerjasama BKKBN dengan PSK UNJA. Jakarta
- Junaidi,J; Zulfanetti, Z; Hardiani,H. (2014). Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Junaidi, J., Zulfanetti,Z. (2016). Analisis Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 141-150.
- Kuncoro, Haryo. (2002). Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol. 7, No 1, 2002. ISSN: 1410-2641 hal 45-56*
- Lin, Steven AY. (1994). *Government Spending and Economic Growth*, IDEAS.
- Mankiw Gregory.(2006).*Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta.
- Nawawi, Hadiri. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Nilasari, L. (2007).*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Barat studi kasus tahun 1986-2005*.Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik: Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Sari, N.; Yulmardi.; Adi Bhakti. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Vol. 5(1); 33-41
- Setianingrum,Erna.(2008). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 - 2006*. Skripsi. FE-UNS: Surakarta.
- Simanjutak ,Payaman J.(1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* . FEUI: Jakarta.
- Sukirno, Sadono.(2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- Sicat, Gerardo P.; Arndt, H.W dan Nirwono.(1991). *Ilmu Ekonomi Mikro Untuk Konteks Indonesia. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial: Jakarta*
- Todaro, M.P dan Stephen C.S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga: Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wibisono , Dermawan .(2003), *Riset Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.